



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DAHYAN ISWAHYUDI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
3. NHK : 400183

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.667.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 259 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 259.000.000
3. Tanah Seluas 2485 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 248.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
5. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA PATI, WARISAN Rp. 260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 101.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK/MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 245.025.000****D. SURAT BERTHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 221.031.230****F. HARTA LAINNYA****Rp. 119.316.002****Sub Total****Rp. 3.354.372.232**



III. HUTANG

Rp. 184.225.188

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.170.147.044

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.